

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iiiiv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	12
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6 Sistematika penelitian.....	15
<b>BAB II TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL DAN</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM.....</b>	<b>19</b>
2.1 konsep Investasi Ilegal.....	19

2.2 Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Investasi Ilegal.....	25
2.2.1 Perbuatan Melawan Hukum Investasi Ilegal .....	20
2.2.2 Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Investasi Ilegal.....	22
2.3 Penanggungjawaban Pidana Korperasi Atas Investasi Ilegal.....	32
<b>BAB III MEKANISME PENGEMBALIAN DANA KERUGIAN KORBAN</b>	
<b>    YANG DISEBABKANOLEH INVESTASI ILEGAL .....</b>	<b>34</b>
3.1 Peraturan perundang undangan yang terkait dengan pengembalian kerugian.....	37
3.2 Pengembalian Kerugian Korban Dalam Peradilan Pidana.....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>xv</b>

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
- Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512)
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Nomor 5602)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)